PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI ACEH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

KHAIRUL ZIKRI
NIM: 4022020029

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LANGSA
2025 M /1447 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

KHAIRUL ZIKRI
NIM: 4022020029

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 29 Januari 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
M. Yahya, S.E, M.Si, MM	**Fakhrizal, Lc, M.A**
NIP. 196512311999051001	**NIP. 198502182018011001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Chahayu Astina, S.E, M.SI
NIP. 198411232019032007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh"** Atas Nama Khairul Zikri dengan Nim 4022020029 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 26 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 24 April 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

M. Yahya, S.E, M.Si, MM
NIP.196512311999051001

Penguji II

Fakhrizal, Lc, MA
NIP.198502182018011001

Penguji III

Mastura, M.E.I
NIP. 198707132023212034

Penguji IV

Muhammad Riza, Lc, MA
NIP.198404142023211022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 198202052007101001

SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KHAIRUL ZIKRI
Nim	: 4022020029
Tempat/TanggalLahir	: Langsa, 21 Agustus 2002
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Dusun Pasar Baru Desa Muka Sei Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Inflasi , Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh** "benar karya asli saya dan bukan plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 07 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



KHAIRUL ZIKRI

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas kebaikan, hidayah, dan karunia-Nya, serta shalawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW, dengan harapan penulis dan pembaca selalu dalam lindungan syafaat-Nya hingga akhir waktu. nantiAamin Ya Robbal'alamin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan jenjang S1 pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan judul skirpsi *"***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh***"*. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak dukungan, bantuan, bimbingan, semangat dan doa dari orang-orang yang berada di sekeliling penulis. Maka dari itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Ibu Chahayu Astina, M.Si, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Muhammad Yahya, M.Si, MM selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Fakhrizal, Lc, M.A, selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Akmal, SHI, M.E.I., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staff TU Prodi Ekonomi Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada orang tua tercinta dan keluarga yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun skripsi di Prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 29 Januari 2025

Khairul Zikri
NIM.4022020029

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	a
ـِـ	Kasrah	i	i
ـُـ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba
فعل - fa‘ala

ذ كر - żukira
يذهب - yażhabu
سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
....َ ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
....َو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:
كيف - kaifa
هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....َا ....َى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ُو..	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:
قال - qāla
رمي - ramā
قيل - qīla
يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) **Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) **Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima
الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمش	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأ خذون	- takhużūna
تأ كلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت من الستطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā. - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillażī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fīhi al-**Qurānu.**

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمدلله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.
- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk runtun waktu yang dianalisis menggunakan metode regresi dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,8313 > 0,05. Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,0106 < 0,05, yang menunjukkan bahwa kenaikan inflasi berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan. Sementara itu, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05 dan koefisien -0,390994, yang berarti peningkatan IPM berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh.

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Aceh..

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of economic growth, inflation, and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in Aceh Province during the 2020-2024 period. The data used is secondary time-series data analyzed using regression methods with the assistance of Eviews 12 software. The results indicate that, partially, economic growth does not have a significant effect on poverty, with a probability value of 0.8313 > 0.05. Inflation has a significant effect on poverty, with a probability value of 0.0106 < 0.05, indicating that rising inflation contributes to increasing poverty levels. Meanwhile, HDI has a negative and significant effect on poverty, with a probability value of 0.0000 < 0.05 and a coefficient of -0.390994, meaning that an increase in HDI helps reduce poverty levels. These findings suggest that improving human resource quality and controlling inflation should be prioritized in poverty alleviation efforts in Aceh.

Keywords*: Economic growth, Inflation, Human Development Index, Poverty, Aceh.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 11
1.3. Batasan Penelitian 12
1.4. Rumusan Masalah 12
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 13
1.5.1. Tujuan Penelitian 13
1.5.2. Manfaat Penelitian 13
1.6. Penjelasan Istilah 15
1.7. Sistematika Penulisan 17
BAB II KAJIAN TEORI **18**
2.1. Kemiskinan 18
2.1.1. Pengertian Kemiskinan 18
2.1.2. Kemiskinan Menurut Perpektif Islam 19
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan 20
2.1.4. Indikator Kemiskinan 22
2.2. Pertumbuhan Ekonomi 23
2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 23
2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Islam 26
2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 27
2.2.4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 29

2.3. Inflasi 30
2.3.1. Pengertian Inflasi 30
2.3.2. Inflasi Menurut Perspektif Islam 32
2.3.3. Jenis-Jenis Inflasi 34
2.3.4. Dampak Terjadinya Inflasi 35
2.3.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi 37
2.3.6. Indikator Inflasi 38
2.4. Indeks Pembangunan Manusia 40
2.4.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 40
2.4.2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Perspektif Islam 42
2.4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM 43
2.4.4. Indikator Indeks Pembangunan Manusia 44
2.5. Penelitian Terdahulu 46
2.6. Kerangka Teoritis 55
2.7. Hipotesis 56
BAB III METODE PENELITIAN 58
3.1. Pendekatan Penelitian 58
3.2. Lokasi dan Waktu penelitian 58
3.3. Unit Analisis dan Horizon Waktu 59
3.4. Sumber Data Penelitian 59
3.5. Definisi Operasional Variabel 60
3.6. Teknik Analisis Data 61
3.6.1. Model Estimasi Regresi Data Panel 61
3.6.2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 63
3.6.3. Uji Asumsi Klasik 64
3.6.4. Uji Hipotesis 66
BAB IV HASIL PENELITIAN 68
4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh 68
4.2 Deskripsi Data Penelitian 69
4.2.1 Data Kemiskinan 69
4.2.2 Data Pertumbuhan Ekonomi 71

4.2.3 Data Inflasi 72
4.2.4 Data Indeks Pembangunan Manusia 73
4.3 Analisis Hasil Penelitian 74
4.3.1. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 74
4.3.2. Uji Asumsi Klasik 75
4.3.3. Persamaan Model Regresi 76
4.3.4. Uji Hipotesis 78
4.4 Interpretasi Hasil Penelitian 80
4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Aceh 80
4.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Aceh 81
4.4.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh 85
4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh 87
BAB V PENUTUP 88
5.1. Kesimpulan 88
5.2. Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 91
LAMPIRAN 94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 3
Tabel 1. 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Aceh 5
Tabel 1. 3 Persentase Inflasi..... 7
Tabel 1. 4 Pergerakan Indeks Pembangunan Manusia di Aceh 10
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 46
Tabel 3. 1 Definisi Operasional 60
Tabel 4. 1 Persentase Inflasi Tahun 2020-2024 72
Tabel 4. 2 Uji Chow 75
Tabel 4. 3 Uji Hausman 75
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas 76
Tabel 4. 6 Hasil Regresi Uji Random Effect Model 77
Tabel 4. 7 Uji Parsial (Uji T) 78
Tabel 4. 8 Uji Simultan (Uji F) 80
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis 56
Gambar 4. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh 69
Gambar 4. 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 71
Gambar 4. 3 Indeks Pembangunan di Provinsi Aceh..... 73
Gambar 4. 4 Uji Heteroskedastisitas.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Salah satu tantangan terbesar bagi umat manusia yang telah ada sejak lama adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan setiap negara dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Kemiskinan merupakan isu pembangunan yang bersifat kompleks karena dalam mengatasi masalah ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada hubungan sebab akibat kemiskinan, tetapi juga melibatkan preferensi, nilai, dan faktor politik.

Fenomena ini sudah ada sejak awal peradaban manusia dan hingga saat ini masih tetap menjadi masalah utama di setiap negara. Terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi persoalan sosial yang terus-menerus relevan untuk dipelajari dan ditangani.[1] Kemiskinan yang ada di Indonesia sering kali menyebabkan berbagai masalah, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat inflasi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 1. 1
Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun	Kemiskinan
2020	9.78%
2021	10.14%

[1]Mira Hastin Dan Ferry Siswadhi, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi," *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan* 10, No. 1 (2021): 12–26.

2022	9.54%
2023	9. 36%
2024	8.57%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)[2]

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang cukup stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan tercatat sebesar 9,78%, yang sedikit meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 9,54%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka kemiskinan yang mencapai 9,36%. Prediksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan semakin menurun lagi, yakni 8,57%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit variasi dari tahun ke tahun, tren penurunan kemiskinan di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat mendesak, bukan hanya karena cenderung meningkat, tetapi juga karena dampaknya yang meluas, mencakup bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan instabilitas politik domestik. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara regional Badan Pusat Statistik sempat menyatakan bahwa Pada tahun 2020, Aceh ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di

[2] Http://Aceh.Bps.Go.Id Diakses Pada Januari 2025

Sumatera dan menempati peringkat keenam secara nasional.[3] Hal ini menandakan tantangan besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Berikut adalah tabel persentase jumlah penduduk miskin di Aceh.

Tabel 1. 2
Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Kemiskinan
2020	15.43%
2021	15.53%
2022	14.75%
2023	14.45%
2024	14.23%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)[4]

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan fluktuasi persentase jumlah penduduk miskin di Aceh dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan di Aceh tercatat sebesar 15,43%. Angka ini sedikit meningkat menjadi 15,53% pada tahun 2021. Namun, mulai tahun 2022, terjadi penurunan, dengan persentase kemiskinan turun menjadi 14,75%. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka kemiskinan mencapai 14,45%. Pada tahun 2024, angka kemiskinan di Aceh semakin menurun menjadi 14,23%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat sedikit fluktuasi, data ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengurangan kemiskinan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun

[3] Ayi, "Temukan Problem Penyebab 'Salah Urus' Kemiskinan Di Aceh," 2020, Https://News.Unimal.Ac.Id/Index/Single/922/Temukan-Problem-Penyebab-Salah-Urus-Kemiskinan-Di
Aceh#:~:Text=Unimalnews%20%7c%20lhokseumawe%20%E2%80%93%20aceh%20yang%20ditetapkan,Apba%20mencapai%20r3p17%2c%20triliun. Dikases Pada 01 Januari 25

[4] Http://Aceh.Bps.Go.Id Diakses Pada Januari 2025

demikian, tingkat kemiskinan di Aceh tetap tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera.

Kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di berbagai daerah termasuk Aceh, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPMC Namun, distribusi pertumbuhan yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan dan mengurangi dampaknya terhadap penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan faktor produksi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, bertambahnya jumlah tenaga kerja akibat pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keterampilan melalui pengalaman dan pendidikan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, peningkatan kapasitas produksi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Sering kali potensi produksi jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi produksi yang terjadi, sehingga perkembangan ekonomi tidak selalu mencapai tingkat optimalnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau mengalami penurunan, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi suatu wilayah, yang pada

akhirnya dapat menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. [5] Sama hal nya di Aceh, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam meningkatkan produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Berikut adalah tabel persentase pertumbuhan ekonomi Aceh.

Tabel 1. 3
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	4.15%
2020	0.37%
2021	2.81%
2022	4.21%
2023	4.23%
2024	4.66%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)[6]

Berdasarkan Tabel 1.3, ertumbuhan ekonomi Aceh pada periode 2019-2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Aceh tercatat sebesar 4,15%, menunjukkan kondisi ekonomi yang stabil. Namun, pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang melanda, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis menjadi hanya 0,37%. Hal ini mencerminkan dampak besar dari pembatasan sosial, terganggunya aktivitas bisnis, serta melemahnya daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2021, perekonomian Aceh mulai mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,79%, yang kemudian terus meningkat menjadi 4,21% pada

[5]Syahrur Romi Dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi," *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah* 7, No. 1 (2018): 1–7, Https://Doi.Org/10.22437/Pdpd.V7i1.4439.

[6] Http://Aceh.Bps.Go.Id Diakses Pada Januari 2025

tahun 2022 dan 4,23% pada tahun 2023. Tren positif ini menunjukkan bahwa ekonomi Aceh telah kembali ke jalur pertumbuhan sebelum pandemi. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,66%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut, mencerminkan semakin kuatnya pemulihan ekonomi dan meningkatnya investasi serta konsumsi masyarakat.

Namun jika meninjau pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh terdapat ketidaksesuaian dengan teorii. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 15,43%, dan justru meningkat menjadi 15,53% pada tahun 2021 meskipun ekonomi mulai tumbuh.

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor lain yang berperan dalam kemiskinan adalah tingginya tingkat harga komoditas, yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga secara umum yang terkait dengan mekanisme pasar dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong konsumsi atau spekulasi, serta gangguan dalam distribusi barang.[7] Inflasi, sebagai salah satu variabel makroekonomi selain pertumbuhan ekonomi, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk menjaga tingkat kestabilannya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase inflasi di Aceh dalam lima tahun terakhir.

[7]Kunto Inggit Dwi Puspa, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-2014," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 2 (2016): 165–75.

Tabel 1. 4
Inflasi Di Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi
2020	3.59%
2021	0.71%
2022	0.77%
2023	3.69%
2024	1.57%

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)[8]

Tabel 1.4 menunjukkan persentase inflasi Aceh menunjukkan fluktuasi yang telah menjadi sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 3,59%, menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Tahun berikutnya, 2021, inflasi menurun drastis menjadi 0,71%, yang mencerminkan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan terkendalinya harga barang dan jasa. Pada tahun 2022, inflasi tetap rendah, yakni 0,77%, yang menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa masih berada dalam kondisi terkontrol. Namun, pada tahun 2023, inflasi meningkat lagi menjadi 3,69%, menunjukkan adanya tekanan harga yang lebih tinggi dalam perekonomian yang dapat disebabkan oleh hal-hal internal atau eksternal yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang. Di tahun 2024, inflasi diperkirakan akan menurun menjadi 1,57%, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi, meski tantangan dalam pengendalian inflasi tetap ada. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Aceh menunjukkan tren yang tidak selalu

[8] Http://Aceh.Bps.Go.Id Diakses Pada Januari 2025

sejalan dengan inflasi. Seperti pada tahun 2021, meskipun inflasi sangat rendah (0,71%), angka kemiskinan justru meningkat menjadi 15,53%.

Tingginya tingkat inflasi dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, terutama dalam sektor konsumsi. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan menurun karena harga barang-barang kebutuhan pokok yang mahal, sehingga masyarakat akan mengurangi pengeluarannya. Padahal, daya beli masyarakat adalah salah satu faktor penggerak utama ekonomi suatu negara. Jika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut akan menjauhkan mereka dari kesejahteraan.

Meskipun banyak negara berkembang yang telah menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, banyak permasalahan pembangunan yang masih belum terselesaikan, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan absolut yang masih meluas, serta rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Di Aceh, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada. Hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga SDA yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Adapun faktor yang dianggap cukup mempengaruhi kemiskinan di Aceh adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme*

(UNDP) dan dipublikasikan secara rutin dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang atau kehidupan sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Hubungan antara IPM dan pembangunan juga telah menjadi indikator penting, di mana pembangunan dipahami sebagai perubahan atau transformasi dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pembangunan diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang mengarah pada perbaikan kondisi dapat dianggap sebagai bagian dari proses pembangunan.[9]

Inti dari pembangunan nasional terletak pada perubahan cara berpikir dan sikap hidup. Hal ini mengarah pada perlunya transformasi mentalitas di kalangan seluruh rakyat Indonesia agar dapat menginspirasi pembangunan nasional, karena setiap proses pembangunan selalu membawa hal-hal baru.[10]

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. IPM digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

---

[9] Soleh, *Dialetika Pembangunan Dan Pemberdayaan* (Surabaya: Fm Fokus Media, 2014), 116.

[10] Manan, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 109.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM akan diikuti dengan penurunan jumlah kemiskinan. Kualitas IPM berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah angka IPM di Aceh pada tahun 2020-2024.

Tabel 1. 5
Indeks Pembangunan Manusia di Aceh Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
2020	71.99
2021	72.18
2022	72.8
2023	74.7
2024	75.36

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)[11]

Sesuai tabel 1.5 dapat dilihat bahwa IPM di Aceh menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, IPM mencatat angka sebesar 71,99, yang sedikit meningkat di angka72,18 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 72,8, dan pada tahun 2023 IPM naik cukup signifikan menjadi 74,7. Pada tahun 2024, diperkirakan IPM akan terus meningkat menjadi 75,36. Peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Namun jika dibandingkan dengan grafik kemiskinan Aceh, terdapat pola yang tidak sesuai dengan teori yaitu, pada tahun 2021, meskipun IPM meningkat

[11] Http://Aceh.Bps.Go.Id Diakses Pada Januari 2025

dari angka 71,99 pada 2020 menjadi 72,18, tingkat kemiskinan justru naik dari 15,43% pada 2020 menjadi 15,53% pada 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, muncul fenomena yang mendorong perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap fakto-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melanjutkan kajian yang meneliti pengaruh variabel makroekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Penelitian ini mengusung judul **"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 15,43%, dan justru meningkat menjadi 15,53% pada tahun 2021 meskipun ekonomi mulai tumbuh. Ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk kemiskinan.
2. Inflasi yang tinggi secara teori cenderung meningkatkan kemiskinan karena melemahkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah. Namun, pada tahun 2021, inflasi di Aceh berada pada level yang sangat rendah, yaitu 0,71%. Meskipun inflasi rendah, tingkat kemiskinan

justru meningkat dari 15,43% pada tahun 2020 menjadi 15,53% pada tahun 2021.

3. Secara teoritis, peningkatan IPM yang mencerminkan perbaikan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seharusnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, data menunjukkan bahwa pada periode 2020-2021, IPM Aceh meningkat dari angka 71,99 menjadi angka 72,18, tetapi tingkat kemiskinan juga naik dari 15,43% menjadi 15,53%.

1.3. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan, agar penelitian tidak terlalu meluas dan lebih terfokus, peneliti memutuskan untuk membatasi kajian pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2020-2024.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh inflasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh tanggapan dari rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu ekonomi syariah.

   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami dan melaksanakan penelitian-penelitian berikutnya, khususnya dalam proses studi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap temuan-temuan yang dihasilkan.

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan kemiskinan.

   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan petunjuk kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.6. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas secara rinci mengenai topik penelitian yang berfokus pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, penulis akan menguraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perkembangan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Isu mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makroekonomi yang berfokus pada jangka panjang [12].

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah angka yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar yang mempengaruhi kualitas hidup dan tingkat produktivitas individu. IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai aspek lain dari pembangunan.[13]

---

[12]Ahmad Afine, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical* 44, No. 8 (2018): 21–25.

[13] Muis Akbar Dkk., "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Aceh," *Akuntansi* 1, No. 4 (2022): 304–18, Https://Doi.Org/10.55606/Jurnalrisetilmuakuntansi.V1i4.147.

3. Inflasi

Inflasi adalah fenomena di mana tingkat harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas ke sebagian besar barang lainnya. Inflasi terjadi ketika harga-harga komoditas secara umum meningkat, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara program pengadaan komoditas (seperti produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat [14].

4. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, baik itu kebutuhan pangan maupun non-pangan. Salah satu cara untuk mengukur kemiskinan adalah dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan jumlah uang yang mereka belanjakan dalam sebulan, yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Jika tingkat konsumsi seseorang berada di bawah konsumsi rata-rata normal, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai miskin.

[14]Lara, "Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Tiga Kota Di Provinsi Aceh)," *Skripsi*, No. 8.5.2017 (2022): 3–5.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh, yang terletak di ujung barat kepulauan Nusantara, memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur penghubung antara Timur dan Barat, baik untuk perdagangan maupun pertukaran budaya, yang sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Aceh terdiri dari 23 kabupaten dan kota, yang terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota. Luas total wilayah Aceh mencapai 5.677.081 hektare, dengan 2.270.080 hektare di antaranya berupa hutan, sekitar 800.401 hektare merupakan lahan perkebunan, dan 3.928 hektare adalah kawasan industri.

Pada akhir tahun 2022, jumlah penduduk Aceh tercatat sekitar 5.407.855 jiwa, dengan 1.073.481 kepala keluarga. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan penduduk Aceh tercatat sebesar 1,66 persen per tahun. Di antara kabupaten dan kota, Kota Sabang mencatatkan laju pertumbuhan penduduk terendah, yaitu hanya 0,10 persen per tahun, sedangkan Kabupaten Aceh Jaya mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi dengan angka 7,90 persen per tahun. Sebaran penduduk di Aceh masih tidak merata, dengan Kabupaten Aceh Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak (532.535 jiwa) dan Kota Sabang dengan jumlah penduduk terkecil (29.184 jiwa).

Sebagai wilayah yang sangat strategis, Aceh menjadi pintu gerbang perdagangan nasional dan internasional, dengan batas wilayah di utara yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, di selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, di barat dengan Samudera Hindia, serta di timur dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Aceh kaya akan sumber

daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, serta perikanan baik di darat maupun laut, yang semua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Data Kemiskinan

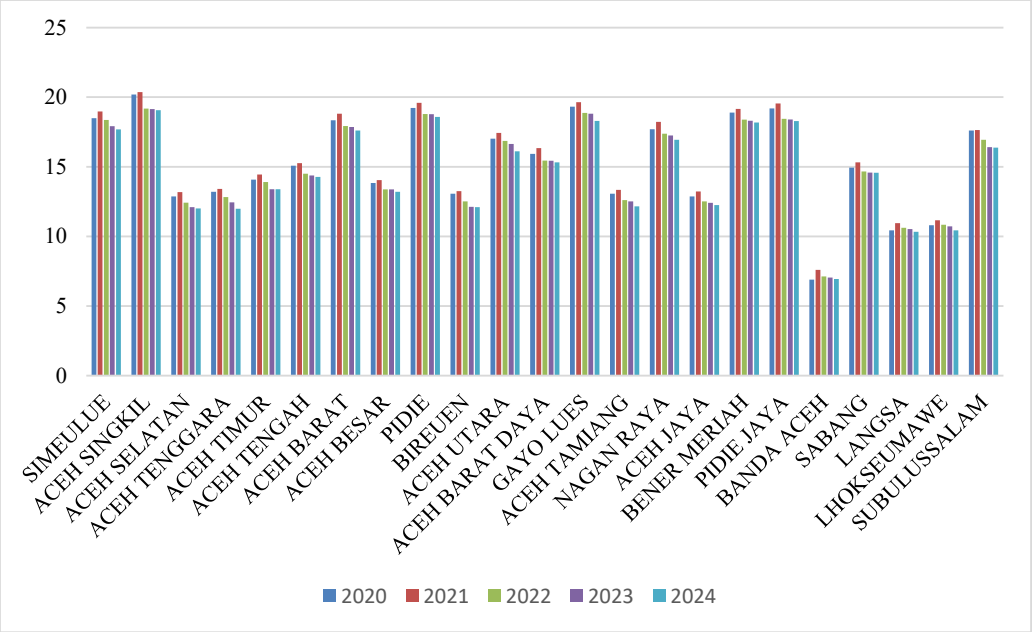

Gambar 4. 1 Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten dan kota di Aceh menunjukkan tren penurunan secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Aceh Singkil menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 20,2% pada tahun 2020 menjadi 19,06% pada tahun 2024. Kabupaten Pidie juga mencatat angka

kemiskinan yang relatif tinggi, meskipun mengalami penurunan dari 19,23% pada tahun 2020 menjadi 18,59% pada tahun 2024. Gayo Lues dan Bener Meriah menunjukkan tren yang mirip, dengan Gayo Lues mengalami penurunan dari 19,32% menjadi 18,30% dalam lima tahun, sementara Bener Meriah turun dari 18,89% menjadi 18,18%.

Di sisi lain, Banda Aceh memiliki tingkat kemiskinan terendah dibandingkan daerah lain, dengan angka yang tetap stabil di bawah 8%, yaitu 6,9% pada tahun 2020 dan menurun sedikit menjadi 6,95% pada tahun 2024. Sabang dan Langsa juga menunjukkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain, dengan Sabang turun dari 14,94% pada tahun 2020 menjadi 14,58% pada tahun 2024, dan Langsa dari 10,44% menjadi 10,33% dalam periode yang sama.

Beberapa daerah seperti Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Utara menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang cukup signifikan. Aceh Barat, misalnya, mengalami penurunan dari 18,34% menjadi 17,6%, sementara Nagan Raya turun dari 17,7% menjadi 16,94%. Aceh Utara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi pada tahun 2020 sebesar 17,02%, berhasil menurunkannya menjadi 16,11% pada tahun 2024.

4.2.2 Data Pertumbuhan Ekonomi

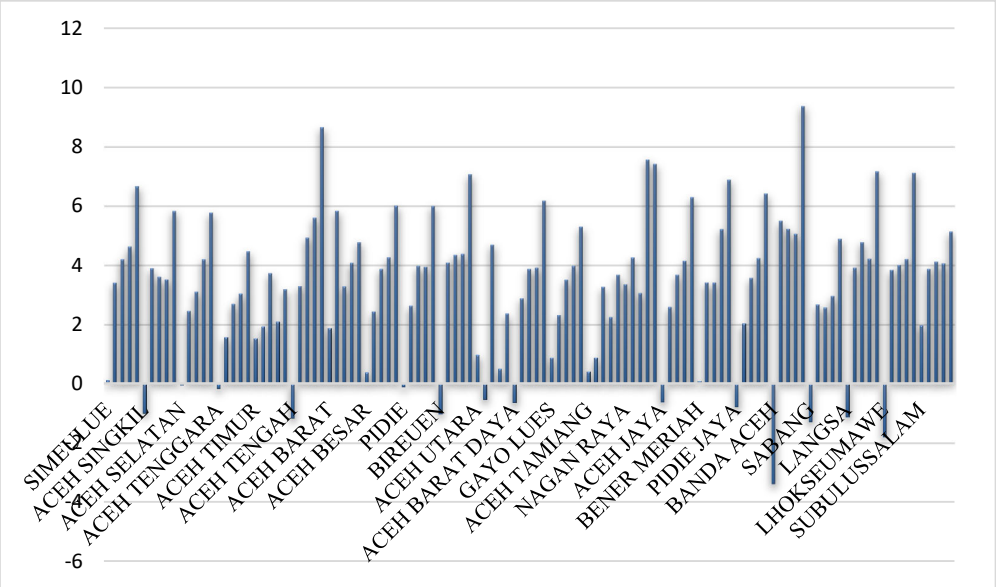

Gambar 4. 2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Grafik pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Aceh menunjukkan variasi yang cukup besar, di mana beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang tinggi, sementara yang lain mengalami kontraksi ekonomi. Subulussalam mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 9,37%, diikuti oleh Aceh Tengah dengan 8,66%, Aceh Tamiang 7,57%, Bireuen 7,07%, dan Aceh Selatan 6,67%. Pertumbuhan yang tinggi di daerah-daerah ini kemungkinan didorong oleh sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan investasi daerah yang berkembang pesat.

Di sisi lain, beberapa daerah mengalami pertumbuhan negatif, yang menunjukkan tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Banda Aceh mencatat kontraksi terbesar dengan angka -3,39%, diikuti oleh Sabang -1,29%, Aceh

Tenggara -1,18%, Aceh Singkil -1,01%, dan Aceh Barat Daya -0,65%. Penurunan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini mungkin disebabkan oleh ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, seperti pariwisata atau sektor informal yang terdampak oleh kondisi eksternal.Sementara itu, sebagian besar daerah lainnya mencatat pertumbuhan yang berkisar antara 2% hingga 6%, dengan beberapa daerah mendekati 5%, seperti Aceh Besar, Pidie, dan Langsa.

4.2.3 Data Inflasi

Tabel 4. 1
Persentase Inflasi Tahun 2020-2024

Tahun	Tingkat Inflasi Aceh
2020	3.59
2021	0.71
2022	0.77
2023	3.69
2024	1.57

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Berdasarkan data tingkat inflasi di Aceh dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 3,59%, yang cukup tinggi dibandingkan tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2021, inflasi mengalami penurunan tajam menjadi 0,71%, menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil dengan tekanan inflasi yang lebih rendah.

Tren inflasi yang rendah berlanjut pada tahun 2022 dengan inflasi sedikit meningkat menjadi 0,77%, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan inflasi kembali ke angka 3,69%,

menandakan adanya tekanan harga yang lebih tinggi, kemungkinan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga barang dan jasa, perubahan kebijakan ekonomi, atau faktor musiman yang mempengaruhi harga komoditas.

Pada tahun 2024, inflasi kembali turun menjadi 1,57%, yang menunjukkan adanya upaya pengendalian inflasi yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik serta efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun nasional.

4.2.4 Data Indeks Pembangunan Manusia



Gambar 4. 3 Indeks Pembangunan di Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten di seluruh kabupaten/kota. Banda Aceh tetap menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Aceh, meningkat dari angka 85,41 pada tahun 2020 menjadi angka 87,17 pada tahun 2024. Kota-kota lain dengan angka IPM tinggi adalah Sabang (75,78

sampai 78,32)**,** Langsa (77,17 sampai 78,81)**,** dan Lhokseumawe (77,31 sampai 79,55)**.** Kota-kota ini memiliki akses lebih baik ke fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, daerah dengan IPM terendah pada tahun 2024 adalah Subulussalam (64,93 sampai 68,04) dan Simeulue (66,03 sampai 69,01)**.** Meskipun mengalami peningkatan, kedua daerah ini masih memiliki tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Terdapat tiga model yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Tiga pengujian dapat digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik: uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model *fixed effect* sebagai model yang lebih disukai untuk penelitian, dibandingkan dengan model *common effect*. Ketika nilai probabilitas f melebihi 0.05, hal ini menunjukkan bahwa model yang dipilih memiliki dampak yang luas. Selain itu, model *fixed effect* dipilih jika nilai probabilitas f lebih kecil dari 0.05.

Tabel 4. 2
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	552.149883	(22,89)	0.0000
Cross-section Chi-square	566.205449	22	0.0000

Berdasarkan uji chow pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa nilai prob. 0.0000 < 0.05, maka dapat didapat kesimpulan bahwa model *fixed effect* lebih cocok untuk diaplikasikan daripada model *common effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengidentifikasi model terbaik antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Model *random effect* dipilih jika nilai prob. lebih tinggi dari 0,05. Selain itu, model *fixed effect* digunakan jika nilai prob. kurang dari 0,05.

Tabel 4. 3
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.843567	3	0.8390

Dapat dilihat bahwa nilai prob. Dalam uji hausman pada tabel adalah 0.8390 > 0.05, maka disimpulkan bahwa model *random effect* lebih cocok untuk diaplikasikan.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Tabel 4. 4
Uji Multikolinearitas

	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	IPM
Pertumbuhan Ekonomi	1.000000	-0.357398	0.202979
Inflasi	-0.357398	1.000000	0.003122
IPM	0.202979	0.003122	1.000000

Berdasarkan hasil uji tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi <0.90, maka dapat disimpulkan terbebas multikolinearitas.

b. Heteroskedastisitas

Gambar 4. 4
Uji Heteroskedastisitas

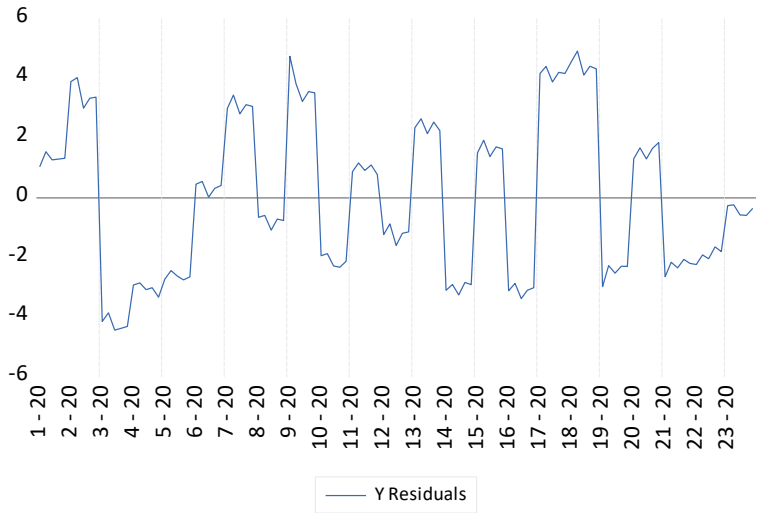

Berdasarkan hasil uji grafik diatas dapat dilihat bahwa pola grafik residual (warna biru) tidak melewati batas (500 dan – 500) artinya residualnya sama , maka dapat disimpulkan seluruh variabel terbebas heteroskedastisitas.

4.3.3. Persamaan Model Regresi

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*, dapat dijelaskan model persamaan sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Regresi Uji *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pertumbuhan Ekonomi	-0.003621	0.016956	-0.213556	0.8313
Inflasi	-0.055242	0.021249	-2.599793	0.0106
IPM	-0.390994	0.039936	-9.790416	0.0000
C	43.45713	2.885924	15.05831	0.0000
Root MSE	0.250637	R-squared		0.667504
Mean dependent var	0.621789	Adjusted R-squared		0.658518
S.D. dependent var	0.436564	S.E. of regression		0.255113
Sum squared resid	7.224160	F-statistic		74.27953
Durbin-Watson stat	1.942344	Prob(F-statistic)		0.000000

Adapun persamaan yang terbentuk dari hasil uji adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{TK= 43.45713+ (-0.003621) + (-0.055242)+ (-0.390994) + e_{it}}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (43.45713) menunjukkan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi (PE), inflasi (INF), dan indeks pembangunan manusia (IPM) bernilai nol, maka tingkat kemiskinan (TK) di Aceh diperkirakan sebesar 43.45713 persen.
2. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (-0.003621) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.003621 persen, dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Nilai koefisien yang kecil mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki

pengaruh yang relatif lemah terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh.

3. Koefisien Inflasi (-0.055242) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam inflasi akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0.055242 persen, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai ini menunjukkan bahwa inflasi yang terkendali berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan kemiskinan.
4. Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (-0.390994) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 poin dalam IPM akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0.390994 persen, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien ini memiliki nilai negatif terbesar, yang menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh paling signifikan dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

4.3.4. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Hasil uji t statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pertumbuhan Ekonomi	-0.003621	0.016956	-0.213556	0.8313
Inflasi	-0.055242	0.021249	-2.599793	0.0106
IPM	-0.390994	0.039936	-9.790416	0.0000
C	43.45713	2.885924	15.05831	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

   Dapat dilihat bahwa nilai *probability* pertumbuhan ekonomi adalah 0.8313 > 0.05 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho1 diterima dan Ha1 ditolak yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020-2024 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024.

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

   Dapat dilihat bahwa nilai *probability* inflasi adalah 0.0106 < 0.05 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima yang menunjukkan bahwa inflasi pada tahun 2020-2024 memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024.

3. Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan

   Dapat dilihat bahwa nilai *probability* IPM adalah 0.0000 < 0.05 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho3 ditolak dan Ha3 diterima yang menunjukkan IPM pada tahun 2020-2024 memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024.

b. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F, tertera pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Uji Simultan (Uji F)

Root MSE	0.250637	R-squared	0.667504
Mean dependent var	0.621789	Adjusted R-squared	0.658518
S.D. dependent var	0.436564	S.E. of regression	0.255113
Sum squared resid	7.224160	F-statistic	74.27953
Durbin-Watson stat	1.942344	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data Eviews

Nilai probabilitas seluruh variabel independen (X) sebesar 0.000000 < 0.05 maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan IPM pada tahun 2020-2024. memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024.

c. Uji Koefesien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.667504
Adjusted R-squared	0.658518

Sumber: Hasil olah data Eviews

Hasil regresi pada tabel diatas menghasilkan nilai *Adjusted R-squared* yang disesuaikan sebesar 0.658518, Kemampuan variabel dependen pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan IPM dalam memengaruhi variabel dependen tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020-2024 adalah sebesar 65.58%, berdasarkan nilai *Adjusted R-squared* yang disesuaikan dalam penelitian ini, sisanya sebesar 34.42% dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Aceh

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan perubahan dalam produksi barang dan jasa suatu daerah dalam periode tertentu, yang sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi.[75] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2020-2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.8313, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga hipotesis nol diterima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tambunan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak inklusif dan hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu.[76]

Salah satu penyebab utama dari tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Aceh adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Todaro dan Smith menjelaskan bahwa meskipun ekonomi suatu daerah tumbuh, jika pertumbuhan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, maka dampaknya terhadap kelompok miskin menjadi terbatas. [77]Di Aceh, perekonomian masih didominasi oleh sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja miskin, seperti sektor ekstraktif dan investasi skala besar, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak merata.

---

[75] Robby J. Kumaat, Debby Ch. Rotinsulu, Dan Vekie A. Rumate, "Analysis Of Income Inequality And Its Effect On Poverty Through Economic Growth (Case Of Talaud Islands District)," Dalam *Proceedings Of The 6th Annual International Conference On Management Research (Aicmar 2019)* (6th Annual International Conference On Management Research (Aicmar 2019), Jakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2020), Https://Doi.Org/10.2991/Aebmr.K.200331.039.

[76] Tulus Tambunan, "Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Empiris," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2019): 125-140.

[77] Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development* (New York: Pearson, 2020).

Selain itu, mayoritas masyarakat miskin di Aceh masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan sektor informal yang memiliki produktivitas rendah. Kuncoro menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan UMKM cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.[78] Dampak pandemi COVID-19 juga memperburuk kondisi ini, di mana banyak usaha kecil mengalami kesulitan, sementara sektor ekonomi modern yang tumbuh tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Aceh belum cukup inklusif untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan produktivitas sektor yang melibatkan masyarakat miskin, seperti pertanian modern, UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Dalam perspektif Islam, konsep pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan produksi dan pendapatan, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Islam menekankan pentingnya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan manfaat

[78] Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2021).

yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum miskin. Islam juga mengajarkan pentingnya sektor pertanian, perdagangan yang jujur, dan keseimbangan dalam ekonomi. Rasulullah ﷺ sendiri menekankan keutamaan sektor produktif yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Prinsip ini dapat diterapkan dengan memperkuat sektor pertanian berbasis syariah, mendorong UMKM yang berlandaskan etika bisnis Islam, serta meningkatkan akses terhadap pembiayaan mikro berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

Dengan demikian, kebijakan ekonomi di Aceh seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Pendekatan berbasis keadilan sosial, distribusi yang merata, serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memastikan

4.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Aceh

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam kurun waktu tertentu, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Inflasi yang tidak terkendali cenderung meningkatkan biaya hidup dan dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Hasil uji statistik parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0.0106, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa inflasi secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh pada periode 2020-2024. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauza yang menyatakan Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kemiskinan.[79]

Sehingga berdasarkan penelitian ini Pemerintah daerah Aceh dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor yang mendukung pendapatan masyarakat miskin. Program kebijakan fiskal seperti subsidi dan penguatan akses pasar bagi usaha kecil dan menengah (UKM) juga dapat dimanfaatkan untuk memitigasi dampak negatif inflasi dan meningkatkan efek positif terhadap pendapatan.

Dalam perspektif Islam, stabilitas harga dan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan sosial. Islam menekankan prinsip keseimbangan dalam ekonomi, termasuk dalam pengendalian inflasi, agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat miskin. Rasulullah ﷺ pernah melarang praktik penimbunan (*ihtikar*), yang dapat menyebabkan kelangkaan barang dan lonjakan harga, sebagaimana dalam hadis:

"Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali ia adalah pendosa." (HR. Muslim)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, pemerintah dan pelaku pasar memiliki tanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah optimalisasi mekanisme zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bentuk

[79] Fauza, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," 70.

perlindungan sosial bagi kelompok rentan terhadap inflasi. Selain itu, kebijakan berbasis prinsip syariah seperti perdagangan yang adil dan penguatan ekonomi berbasis keumatan dapat membantu mengurangi dampak inflasi terhadap kemiskinan, sehingga kesejahteraan dapat terdistribusi secara lebih merata.

4.4.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak (pendapatan per kapita). IPM mencerminkan sejauh mana pembangunan manusia berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, karena peningkatan IPM umumnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil uji parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Koefisien variabel IPM sebesar -0.390994 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 poin pada IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.390994 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil ini mempertegas bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia, yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Aceh pada periode 2020-2024.

Hal ini sejalan dengan penelitian terkait yang telah dilakukan oleh Fahrati, yang manunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan.[80] Dan juga dengan hasil penelitian terkait yang dilakukan sitanggang bahwa IPM berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.[81]

Hasil ini menegaskan pentingnya investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan di Aceh. IPM yang tinggi mencerminkan kemampuan individu dan rumah tangga untuk memperoleh layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan.

Pemerintah Aceh perlu memperkuat program pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM) juga harus ditingkatkan untuk menciptakan peluang kerja yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam Islam, pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan sosial. Konsep pembangunan manusia dalam Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

---

[80]Eni Fahrati Alviannor, "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan" 4, No. 1 (2021): 6.

[81]Dessy Chayani Dan Elisabeth Sitanggang, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Analysis Of Poverty Influence On Human Development Index And Labor In North Sumatera Province" 4 (2020): 225–32.

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup memerlukan usaha dan komitmen bersama, baik dari individu maupun pemerintah. Pendidikan dalam Islam dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Rasulullah ﷺ juga menekankan pentingnya bekerja dan mencari rezeki yang halal sebagai bentuk ibadah dan cara untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian, upaya meningkatkan IPM di Aceh selaras dengan prinsip Islam yang mengajarkan keseimbangan antara ilmu, kesehatan, dan ekonomi dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, seperti penguatan pendidikan berbasis karakter, dukungan ekonomi bagi yang membutuhkan melalui zakat dan wakaf, serta pelayanan kesehatan yang merata, dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Aceh

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan IPM secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.658518 menunjukkan bahwa 65.58%, variasi

tingkat kemiskinan di Aceh dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Sisanya, sebesar 34.42% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh. Pembangunan ekonomi tidak hanya perlu berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada stabilitas inflasi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang memadai. Kombinasi ini menunjukkan pentingnya hubungan sinergis antara kebijakan makroekonomi dan program kesejahteraan sosial.[82]

Pemerintah harus meningkatkan upaya pembangunan yang inklusif, dengan memprioritaskan pengelolaan pertumbuhan ekonomi agar lebih berorientasi pada pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, pengendalian inflasi harus terus dilakukan melalui penguatan distribusi kebutuhan pokok dan kebijakan stabilisasi harga. Program pembangunan manusia juga harus ditingkatkan agar dapat mengatasi penyebab struktural kemiskinan secara lebih efektif.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab IV:

[82] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Aceh, *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: Kantor Pusat Adminstrasi Universitas Syiah Kuala, 2015), 235.

1. Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8313 > 0,05, dengan koefisien sebesar -0,003621. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,03621 %. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis perekonomian Aceh.
2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas inflasi adalah 0,0001, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa inflasi secara signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Aceh pada periode 2020-2024.
3. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai probabilitas 0.0000< 0.05 yang nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien -0,236351. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan 1 poin dalam IPM mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,23%. Penurunan kemiskinan sejalan dengan peningkatan kualitas hidup, yang tercermin dalam peningkatan aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
4. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai probabilitas F-statistic 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai

Adjusted R-squared sebesar 0,697664 menunjukkan bahwa 69,76% variasi tingkat kemiskinan di Aceh dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya 30,24% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengelolaan inflasi yang stabil, dan pembangunan manusia yang berkualitas secara bersama-sama menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi kemiskinan di Aceh.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Untuk lebih meningkatkan pendistribusian pendapatan daerah secara adil dan merata sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat, contohnya seperti pemerintah Aceh membuat penyuluhan dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat.

b. Bagi BPS

Berdasarkan hasil penelitian ini, Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan ketersediaan data terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, IPM, dan kemiskinan secara berkala agar dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, BPS

perlu menyediakan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh. Dukungan terhadap kebijakan berbasis data juga perlu diperkuat dengan menyediakan informasi yang lebih detail bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi ekonomi yang lebih inklusif, terutama dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai referensi maupun acuan dalam menelaah lebih dalam mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi ,dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Aceh. Serta dapat menambah variabel lain dan periode lebih lama sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Afine, Ahmad. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical* 44, No. 8 (2018): 21–25.